

STRATEGI PENGELOLAAN PARIWISATA DI PEDESAAN

Gandung Senatama

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email Korespondensi: gandungsenatama@student.uns.ac.id



Affiliasi

Prodi Magister Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret Surakarta,
Provinsi Jawa Tengah

Histori Artikel

Received:

7 Agustus 2024

Reviewed:

13 Agustus 2024

Revised:

19 Agustus 2024

Accepted:

31 Agustus 2024

Abstract

Tourism management needs to be carried out optimally, including rural-based tourism, namely villages. Many new tourist attractions have emerged that are managed by the community. However, they have not been optimal in running them. There needs to be an understanding and provision of knowledge to the management of the Tourism Awareness Group (Pokdarwis). The purpose of this study was to see and understand tourism management in Maron Village. This study uses a qualitative approach with interview and observation data collection methods. The interview objects studied were three parties involved in tourism management in Maron Village. From the results of the study, the strategy for managing tourism in rural areas through the focus of the study so that researchers can see the strategic process being carried out. The researcher chose Dersono Village, Kabupaten Pacitan District, Kabupaten Pacitan Regency, especially in the Maron River area as the research location because it has very abundant natural resources that are rarely owned by other areas and is a natural tourism that has just been developed by the local village government. In addition, it is also one of the largest sources of original village income in Dersono Village, Pringkuku District, Kabupaten Pacitan Regency. The results of the study explain that tourism management in Maron Village has shown optimality. This can be seen from the regulations that have been set by the Maron Village Government to the management structure that has been listed.

Keyword:

Tourism, Tourism Rural, Management Strategy, Tourist Village and

Abstract

Background – Tourism management needs to be carried out optimally, including rural-based tourism, namely villages. Many new tourist attractions have emerged that are managed by the community. However, they have not been optimal in running them. There needs to be an understanding and provision of knowledge to the management of the Tourism Awareness Group (Pokdarwis). The purpose of this study was to see and understand tourism management in Maron Village.

Aim – The purpose of this study was to see and understand tourism management in Maron Village.

Design / methodology / approach – This study uses a qualitative approach with interview and observation data collection methods. The interview objects studied were three parties involved in tourism management in Maron Village.

Findings – From the results of the study, the strategy for managing tourism in rural areas through the focus of the study so that researchers can see the strategic process being carried out. The researcher chose Dersono Village, Pacitan District, Pacitan Regency, especially in the Maron River area as the research location because it has very abundant natural resources that are rarely owned by other areas and is a natural tourism that has just been developed by the local village government. In addition, it is also one



of the largest sources of original village income in Dersono Village, Pringkuku District, Pacitan Regency. The results of the study explain that tourism management in Maron Village has shown optimality. This can be seen from the regulations that have been set by the Maron Village Government to the management structure that has been listed.

Research Implication – This research has an impact on the management system that will be carried out by the local village government and as a consideration for policies that will be implemented in Dersono Village.

Limitations – From the results of this study, there is a novelty value related to the topics explained and discussed. A tourism management strategy in rural areas that occurred after the COVID-19 outbreak. For further research, it can look at tourism management in terms of actors or institutions. Because there are still very few studies that raise the theme of tourism management in terms of the actors or institutions involved. The limitations of this study in terms of time are quite difficult to find a schedule that fits the resource person.

PENDAHULUAN

Badan usaha merupakan salah satu jenis pergerakan utama dalam industri perjalanan dan usaha, di mana bersama dengan unsur - unsurnya akan diestimasi berdasarkan asas - asas yang telah ditetapkan bersama dalam pembahasan - pembahasan yang akan dilakukan bersama sebagai organisasi spesialis industri perjalanan. Setiap unsur jika ditinjau dari sisi pengelolaan, maka tidak jauh dari perubahan provinsi dan sejalan dengan kemandirian daerah. Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mengatur berbagai bidang yang dapat diciptakan, antara lain bidang devisa, bidang administrasi, bidang industri perjalanan dan lain - lain. Demikian, para analis tertarik untuk melakukan pengecekan tambahan pada satu bidang, yaitu industri perjalanan.

Kawasan industri perjalanan merupakan sumber daya negara yang dapat membangun pendapatan daerah dan masyarakat (Buditiawan, 2020). Oleh karena itu, diperlukan suatu pembenahan yang dapat dikelola dalam industri perjalanan. Peningkatan industri perjalanan diharapkan dapat mengembangkan perekonomian dan bantuan pemerintah terhadap jaringan lingkungan. Berikut ini adalah jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan Jawa Timur Tahun 2021 – Tahun 2023:

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023

Bulan	Jumlah Kedatangan Wisatawan Asing (Kunjungan)		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Januari	2.000	-	10.815
Februari	69.000	-	11.919
Maret	5.200	5.700	10.653
April	10.800	1.468	12.361
Mei	16.000	4.598	15.734
Juni	18.100	4.722	18.025
Juli	5.200	6.087	20.303
Agustus	1.000	8.386	25.548
September	200	9.152	25.593
Oktober	3.700	9.415	-

Bulan	Jumlah Kedatangan Wisatawan Asing (Kunjungan)		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
November	-	9.644	-
Desember	-	14.264	-

Sumber : BPS Jawa Timur, 2024

Berdasarkan Tabel 1. di atas, Tahun 2023 merupakan tahun puncak kunjungan para wisatawan mancanegara ke Provinsi Jawa Timur setelah masa pandemi COVID-19 dinyatakan endemis. Namun, penyajian data belum lengkap sejak Bulan Oktober, November, dan Desember di Tahun 2023. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Handisa (2022) menyampaikan bahwa perlu adanya penerapan Standar Nasional Indonesia dalam pengelolaan pariwisata alam. Selain dari sisi pembangunan pariwisata, terdapat dampak dari keberadaan usaha pariwisata terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Aspek perekonomian memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan pembangunan suatu daerah, termasuk desa kecil.

Desa memiliki tugas dan juga tanggung jawab yang luas dalam melaksanakan pembangunan daerah. Otonomi berpeluang untuk memunculkan potensi desa yang lain (Aeni et al., 2021). Demikian, desa tidak menutup kemungkinan akan menjadi semakin besar sebagai akibat dari pariwisata desa, sehingga tidak dapat dihindari oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Hubungan yang harmonis dalam suatu desa menjadi nilai yang akan dicari oleh wisatawan (Sulistyo et al., 2023). Banyak jenis wisata bermunculan di tengah masyarakat, terutama di desa, seperti wisata seni, adat istiadat, kuliner, bahkan wisata religi. Kabupaten Kabupaten Pacitan memiliki banyak wisata alam dengan bentang alam yang unik. Berikut ini adalah jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Kabupaten Pacitan:

Tabel 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pacitan Tahun 2022 - Tahun 2023

Tempat Wisata	Luar negeri		Lokal	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
Goa Gong	20	8	102357	140050
Banyu Anget	-	-	43893	53219
Goa Tabuhan	-	-	7465	12067
Pantai Klayar	-	5	220417	312421
Pantai Srau	23	36	80767	72341
Pantai Watu Karung	75	122	167863	116083
Pantai Pancer Door	51	58	85256	80619
Pantai Taman	-	-	11292	10160
Pantai Buyutan	9651	5	-	17792
Pantai Telengria	-	-	195379	197332
Pantai Soge	-	-	55881	146740
Pantai Pidakan	-	-	31375	34510
Pantai Banyu Tibo	134	8	3684	6647
Monumen Jenderal Sudirman	-	-	20686	32300
Taman Beiji	-	-	25866	41078
Sungai Maron	-	4	132304	113275
Pantai Ngriroboyo	-	-	25472	24826

Tempat Wisata	Luar negeri		Lokal	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
Sentono Genthong	-	2	26669	42301
Pantai Watu Bale	-	5	6448	19636
Pantai Pangasan	115	11	19215	39560
Luweng Jaran	-	-	-	2
Luweng Ombo	-	-	-	2
Museum Song Terus	34	-	34425	50992
Museum Geopark	-	-	-	1969

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, 2024

Berdasarkan Tabel 2., jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pacitan untuk tujuan wisata menunjukkan bahwa telah terjadi adanya peningkatan ataupun penurunan. Namun, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke objek wisata juga masih relatif sedikit. Sungai Maron merupakan salah satu objek wisata berada di Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Objek wisata yang baru dibuka sejak Tahun 2015 ini telah memberikan daya tarik yang mengagumkan bagi masyarakat dikarenakan keunikannya. Sungai Maron yang kerap kali dijuluki *Green Canyon*-nya Negara Indonesia ini, memiliki ciri khas warna air sungai yang hijau kebiruan serta pepohonan kelapa yang tumbuh di sepanjang aliran sungai. Selain itu, Sungai Maron menjadi tempat wisata favorit kedua setelah Pantai Klayar yang berada di posisi pertama.

Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Pacitan hanya memantau sembilan destinasi wisata yang diawasi langsung oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, antara lain Pantai Taman, Pantai Pancer Door, Pantai Srau, Pantai Watu Karung, Ocean Side, Pantai Klayar, Pantai Buyutan, Goa Gong, dan Goa Tabuhan. Kabupaten Pacitan dengan potensi yang dimilikinya memerlukan adanya pengelolaan wisata yang baik dan tepat. Selama ini pengelolaan objek wisata di Kabupaten Pacitan masih belum optimal dan belum merata. Nofiasari et al. (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan di media sosial belum optimal, terlihat dari penguatan branding Sungai Maron yang belum optimal dalam menarik minat wisatawan.

Pemerintah Kabupaten Pacitan berupaya semaksimal mungkin mengembangkan dan memasarkan setiap objek wisata. Saat ini banyak objek wisata yang dikelola oleh pemerintah desa melalui karang taruna atau kelompok sadar wisata. Oleh karena itu, objek wisata di Kabupaten Pacitan dapat berkembang pesat sesuai dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pacitan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Wisata desa menjadi pintu gerbang utama bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi desa dikarenakan masyarakat yang paling mengerti dan paham mengenai bagaimana cara mengembangkan potensi desanya. Sungai Maron dikelola secara langsung oleh pemerintah desa yang memiliki peran apapun terkait pengelolaannya maupun pemasarannya. Pemerintah daerah berperan sebagai pembina untuk memberikan saran dan masukan agar Sungai Maron dapat berkembang dengan baik. Pemerintah Desa Dersono, melalui masyarakat Dusun Maron saat ini tengah menyusun strategi untuk mengelola Sungai Maron. Pendapatan yang diperoleh dari Sungai Maron kesemuanya masuk ke dalam pendapatan desa.

Desa Dersono menekankan potensi sungai ini agar dapat menjadi pendapatan utama bagi Desa Dersono. Buhalis (2000) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan industri pariwisata terdapat beberapa kegiatan, yaitu seperti: pemasaran destinasi wisata, pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya, pengelolaan keuangan, pengelolaan operasional pariwisata dan pengelolaan risiko. Desa Maron belum mengoptimalkan untuk pengelolaan potensi desanya.

Pengelolaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk berjalannya pariwisata di desa tersebut. Sementara, pengelolaan sumber daya manusia ini digunakan untuk sektor pariwisata sangat penting terkait kesiapan dan kemampuan pengelola wisata desa untuk mengelola serta memajukan potensi pariwisata (Isabella, 2024). Demikian, perlunya pendampingan yang sangat intens kepada pengelola pariwisata di Desa Maron. Tujuan pendampingan pada pengelola pariwisata adalah agar mampu berjalan secara mandiri dan proses pengelolaan pariwisata mampu mandiri.

Potensi sumber daya nantinya akan diserap oleh masing - masing desa. Diketahui bahwa Sungai Maron merupakan destinasi wisata yang baru dikembangkan di Kabupaten Kabupaten Pacitan yang perlu dikelola dengan baik dan benar. Tantangan yang selama ini menjadi kendala bagi Desa Maron adalah akses yang masih belum bisa dilalui oleh kendaraan besar seperti bus pariwisata. Selain itu, kearifan lokal tetap dijaga secara optimal dikarenakan keberadaan pihak swasta yang untuk terlibat dalam investasi serta untuk mendirikan wisata buatan di Maron yang secara langsung akan merusak keindahan dan kearifan lokal desa.

Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan keleluasaan bagi setiap desa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Di sisi lain, penyebab kondisi wisata saat ini menunjukkan jika sektor pariwisata sangat digemari dan telah mampu menyumbang pendapatan daerah terbesar. Oleh karena itu, penelitian ini mendasarkan pada strategi pengelolaan pariwisata berbasis desa adalah karena Pemerintah Kabupaten Pacitan sangat memperhatikan sektor pariwisata.

KAJIAN TEORI

Penelitian ini mengacu pada teori manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol (1841) dalam Fernanda & Sukmana (2024) sebagai berikut:

1. Perencanaan

Keempat fungsi lain seharusnya dijalankan berdasarkan perencanaan awal, sehingga proses perencanaan memiliki arti yang sangat penting. Meskipun demikian, hakikat perencanaan haruslah bersifat dinamis dan fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan. Perencanaan juga harus mengarah ke masa depan, karena banyak sekali ketidakpastian di masa mendatang, jelas Henry Fayol. Langkah-langkah awal dalam perencanaan harus ditentukan dengan baik, untuk menentukan strategi yang tepat guna mewujudkan tujuan suatu organisasi.

2. Organisasi

Sentralisasi wewenang pada level pimpinan organisasi akan memungkinkan pemusatan berbagai fungsi dengan baik dalam kewenangan pimpinan. Kepemimpinan juga harus dipisahkan secara tegas dalam kewenangannya, misalnya pada kepemimpinan manajerial sebagai pusat wewenang dengan bidang kegiatan teknis atau non-manajerial. Henry Fayol menegaskan bahwa prinsip - prinsip pengorganisasian adalah pembagian tugas kerja, kesatuan pengarahan, dan sentralisasi pada level organisasi.

3. Wibawa

Fungsi pengarahan dimaksudkan untuk memberikan panduan dan arahan yang tepat kepada SDM atau karyawan suatu organisasi sehingga semua tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat.

4. Koordinasi

Fungsi koordinasi juga dapat diartikan sebagai pengikatan atau penyatuan serta penyesuaian seluruh kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana awal dan mencapai tujuan akhir suatu organisasi.

5. Kontrol

Fungsi pengendalian dapat diartikan sebagai pemantauan atau memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam pelaksanaan perencanaan telah berjalan sesuai dengan tahapan fungsi manajemen sebelumnya dan mencapai sasaran. Fungsi pengendalian juga memudahkan evaluasi atau pencarian solusi atas permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan rencana, dengan solusi yang tepat dan signifikan.

Mill & Morison, 2002 dalam Hariani et al. (2020) menjelaskan perencanaan pariwisata mencakup beberapa kondisi berikut:

1. Kesadaran, yaitu: pemasaran dan promosi termasuk branding destinasi, strategi pemasaran.
2. Daya tarik, yaitu pengembangan produk termasuk atraksi dan atraksi baru ditingkatkan.
3. Ketersediaan, yaitu pemasaran dan promosi termasuk saluran distribusi, komunikasi dan teknologi informasi
4. Aksesibilitas:
 - a. Transportasi, seperti bandara dan layanan penerbangan.
 - b. Infrastruktur, seperti jalan raya, rel kereta api, dan akses air bersih.
 - c. Zonasi pariwisata, seperti koridor perjalanan dan sistem rute.
5. Penampilan:
 - a. Zonasi pariwisata mencakup keindahan pintu masuk utama.
 - b. Pengembangan produk mencakup perencanaan zona kedatangan secara keseluruhan dan pemeliharaan ruang publik.
6. Aktivitas:
 - a. Pengembangan produk mencakup festival dan acara pariwisata.
 - b. Program ini mencakup kegiatan individu.
7. Jaminan:
 - a. Standar mutu layanan pariwisata mencakup program jaminan mutu.
 - b. Keselamatan dan keamanan, termasuk program kesehatan masyarakat dan ketersediaan pasokan makanan.
 - c. Infrastruktur termasuk program keamanan publik.
 - d. Perundang-undangan dan peraturan termasuk peraturan tentang praktik operasional.
8. Apresiasi:
 - a. Sumber daya manusia termasuk pelatihan keterampilan perhotelan.
 - b. Sikap masyarakat termasuk pelatihan bahasa asing dan kesadaran pariwisata bagi masyarakat. Manajemen Destinasi Pariwisata 115
9. Tindakan; statistik dan penelitian termasuk rencana pariwisata jangka panjang, rencana pemasaran, program penelitian dan implementasi.
10. Akuntabilitas:
 - a. Kerangka kelembagaan termasuk struktur organisasi.
 - b. Statistik dan penelitian termasuk evaluasi kinerja dan statistik tentang ukuran pasar pariwisata dan dampak pariwisata.
11. Akomodasi, yaitu akomodasi termasuk hotel dan resor, serta akomodasi khusus.
12. Aktor, yaitu peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan program.
13. Agenda keberlanjutan, yaitu kebijakan yang mencakup kebijakan pariwisata berkelanjutan

14. Alokasi, yaitu anggaran, meliputi kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan
15. Capaian (hasil yang ingin dicapai), yaitu jangka waktu yang meliputi jangka waktu pelaksanaan dan tujuan yang ingin dicapai.

Penelitian ini menggunakan metode manajemen pariwisata menurut *World Trade Organization*, 2013 dalam Dewi (2021) yang, meliputi: kegiatan sebagai berikut:

1. Konsultasi dengan semua pemangku kepentingan.
Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui pertemuan formal dan terstruktur dengan pelaku industri pariwisata, dewan pariwisata, konsultasi publik tentang subjek tertentu, penilaian dan survei, konsultasi kebijakan dengan berbagai kelompok kepentingan, dan melalui interaksi antara departemen pemerintah terkait dan berbagai pihak sesuai dengan subjek yang ditentukan.
2. Pengidentifikasi masalah.
Permasalahan industri perjalanan akan semakin beragam seiring dengan bertambahnya jumlah kegiatan yang dilakukan. Permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan industri perjalanan, misalnya sosialisasi dan tingkat upah antar distrik; perbaikan fondasi termasuk transportasi, spekulasi asing; persaingan global dan pengawasan pasar; kemajuan dalam industri perjalanan; inspeksi dan pengukuran industri perjalanan; pendidikan dan persiapan industri perjalanan; pengaruh industri perjalanan; undang-undang tidak resmi, biaya, hubungan modern, dan kebutuhan untuk menumbuhkan premi luar biasa dari area industri perjalanan (MICE, industri perjalanan pedesaan, pengiriman perjalanan, ekowisata, dll.).
3. Proses perumusan kebijakan.
Strategi yang dibentuk dapat memberikan dampak terhadap industri pariwisata. Strategi ini akan menjadi alat bantu bagi pelaku industri pariwisata dalam memahami visi dan misi peningkatan industri pariwisata. Kebijakan ini akan menjadi standar pelayanan bagi pariwisata yang dilakukan di daerah. Semua wisatawan diharuskan untuk mematuhi kebijakan yang telah disetujui oleh pemangku kepentingan setempat. Proses perumusan kebijakan harus melihat potensi yang akan terjadi pada objek wisata tersebut.
4. Pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas khusus.
Para spesialis agensi ini berharap dapat menciptakan tindakan yang dipikirkan dengan matang sebagai bantuan dalam memamerkan dan meningkatkan kualitas daerah tujuan wisata yang sesungguhnya. Agen ini juga dipercaya untuk memimpin survei statistik, mengiklankan daerah lokasi wisata, dan memberdayakan pengembangan kantor dan organisasi industri perjalanan. Agen ini juga berfungsi untuk mempromosikan objek wisata yang ada. Dengan pendanaan, diharapkan para agen dapat bekerja secara optimal untuk membantu mengembangkan pariwisata.
5. Penyediaan fasilitas dan pengoperasian tempat wisata.
Terkait dengan situasi, di mana para pelaku bisnis tidak dapat menyediakan kantor secara bebas. Pemerintah berperan dalam menyediakan modal usaha, menyediakan dana abadi bagi kantor-kantor dan administrasi penting tetapi tidak dapat membiayai sendiri, tetapi dalam jangka panjang menjadi penentu hasil kemajuan industri pariwisata. Fasilitas yang ada di tempat wisata akan memberikan kesan positif bagi wisatawan yang berkunjung. Lakukan patroli secara berkala untuk menciptakan tempat wisata yang kondusif.
6. Ketentuan terkait kebijakan fiskal, regulasi, dan lingkungan sosial yang kondusif.
Penting bagi asosiasi/ organisasi untuk mencari keuntungan atau menetapkan target organisasi. Ketiga aspek ini akan melengkapi proses pengelolaan objek wisata. Dengan harapan akan tercipta destinasi wisata yang kondusif.

7. Penyelesaian konflik

Pekerjaan ini memang merepotkan, tetapi akan menjadi pekerjaan penting di era di mana ekologi dan pelestarian aset menjadi isu penting. Tidak mungkin pekerjaan ini berjalan lancar tanpa masalah. Jika melibatkan masyarakat setempat, pasti akan menimbulkan kesalahpahaman yang akan menimbulkan masalah.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perolehan data dari penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Narasumber proses wawancara adalah Kepala Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan karena beliau merupakan stakeholder di Desa Maron dan sebagai pengambil kebijakan publik di tingkat desa. Ketua Pokdarwis Sungai Maron karena beliau merupakan tokoh yang mengelola dan menjadi atasan dalam struktur pengelolaan pariwisata di Desa Maron serta mengetahui lebih dalam kondisi luar dalam kelompoknya dan Kepala Dusun Maron Desa Dersono sebagai tokoh masyarakat yang wilayahnya merupakan potensi wisata utama di Desa Maron.

Penelitian ini dilakukan di objek wisata Sungai Maron Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Kabupaten Pacitan dan Kantor Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Kabupaten Pacitan. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan September, Oktober dan November 2023. Dengan cara tersebut peneliti berusaha mencari data sebagai bahan untuk menggambarkan secara akurat mengenai strategi yang digunakan untuk mengelola pariwisata berbasis desa. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk melihat keabsahan data penelitian.

Peneliti untuk melihat tren penulisan terkait topik penelitian menggunakan Scopus dengan kata kunci pencarian yaitu “desa*” DAN “pariwisata*” DAN “manajemen*” DAN “strategi*” kemudian menghasilkan sebanyak 255 dokumen dengan rentang waktu rentan tahun 1989 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan Gambar 1., Keseluruhan dokumen yang diperoleh peneliti selanjutnya akan melalui proses seleksi yang terdiri dari telaah judul dokumen terkini, abstrak, kata kunci, dan isi artikel dari penelitian sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa topik penelitian memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Sementara, Gambar 2., terlihat adanya peningkatan tren penelitian yang memiliki topik yang sama. Terjadi lonjakan dokumen yang signifikan mulai tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2024. Selanjutnya, penulis menggunakan *software VosViewer* untuk melihat bibliometrik. Berikut ini adalah hasil pencarian pada Scopus:



Gambar 1. Hasil Pencarian Penelitian Sebelumnya di Scopus

Sumber: Data diolah, 2024

Terlihat tren penelitian sebelumnya dengan grafik yang tersedia di Scopus dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah gambar topik penelitian sebelumnya:



Strategi pengelolaan desa wisata merupakan arah penetapan sasaran desa wisata untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dapat memenuhi harapan masyarakat melalui proses pendayagunaan sumber daya manusia yang meliputi fungsi manajemen, seperti: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut diperlukan strategi yang tepat agar tercipta desa wisata penglipuran yang semakin maju dan berkembang. Perancangan strategi sangat penting untuk mencermati kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada desa wisata penglipuran. Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Kabupaten Pacitan terkenal dengan wisata Sungai Maron. Pengelolaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan dibantu oleh Pemerintah

Desa Dersono dan di bawah pengawasan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kabupaten Pacitan. Sungai Maron merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Kabupaten Pacitan yang memiliki air yang sangat indah, berwarna hijau jernih dan di sepanjang sungai terdapat pepohonan kelapa yang rimbun dan pengunjung menyewa perahu untuk menyusuri Sungai Maron yang memiliki panjang sungai mencapai 4,5 km.

1. Keterlibatan Masyarakat dengan Semua Pemangku Kepentingan.

Berdasarkan pendapat Bapak Suwarman selaku Kepala Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Kabupaten Pacitan dan Bapak Agus selaku Kepala Dusun Maron Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Kabupaten Pacitan, sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kabupaten Pacitan berperan dalam mempromosikan pariwisata dan memberikan masukan kepada warga serta pemerintah desa terkait wisata Sungai Maron. Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Pacitan menyediakan wadah untuk perawatan perahu terkait sarana transportasi, sedangkan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kabupaten Pacitan memberdayakan masyarakat Dusun Maron dengan membentuk kelompok usaha bersama Dusun Maron Desa Dersono.

Dalam kesehariannya, pemerintah desa menyelenggarakan kegiatan pariwisata dengan pengawasan langsung dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kabupaten Pacitan. Pengelolaan pariwisata sepenuhnya dikelola langsung oleh Pemerintah Desa Dersono. Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Pacitan memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Desa Dersono untuk mengelola pariwisata desa. Kegiatan pariwisata di Desa Dersono melibatkan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Dersono yaitu, Badan Usaha Milik Desa Dersono, Kelompok Sadar Wisata Dusun Maron, Desa Dersono, dan Kelompok Usaha Bersama Dusun Maron. Ketiga lembaga ini saling berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata di Desa Dersono. Masyarakat sebagai pelaku usaha di bidang pariwisata akan berusaha mencari keuntungan bagi usahanya.

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah sangat diperlukan untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi di lapangan. Dengan mengutamakan penanganan isu-isu strategis tersebut, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan semakin besar dan pasti. Namun, apabila isu-isu strategis tersebut tidak ditangani secara serius, maka yang terjadi justru sebaliknya, yaitu tujuan dan sasaran akan menjadi sulit tercapai.

Konteks isu dalam manajemen pariwisata menyangkut kegiatan pariwisata. Isu-isu pariwisata akan semakin beragam dari waktu ke waktu. Desa Dersono terkenal dengan wisata Sungai Maron, wisatawan datang untuk menyusuri sungai dengan menggunakan perahu. Seiring berjalannya waktu jumlah pengunjung Sungai Maron terus meningkat. Kebutuhan akan pemenuhan keterampilan sebagai penyedia objek wisata sangat kurang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Sungai Maron memiliki permasalahan yang kompleks.

Bermula dari kurangnya pelatihan pariwisata yang memadai, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi pengelola agar dapat memberikan pelayanan pariwisata yang baik. Narasumber untuk mengarahkan pengelola dapat memahami konsep dan contoh kasus manajemen pariwisata di daerah lain. Promosi pariwisata Sungai Maron juga masih rendah. Hal ini dapat dilihat bahwa konsep promosi pariwisata kurang matang sehingga hanya terkesan seadanya saja.

Promosi pariwisata dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak. Pelatihan bagi sumber daya manajemen juga sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan manajemen pariwisata Sungai Maron. Saat ini pelatihan yang diberikan masih sangat kurang.

3. Penyusunan Kebijakan Manajemen

Pada tahap penyusunan kebijakan akan mempengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata. Kebijakan yang dirumuskan akan memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap pariwisata. Kebijakan ini akan menjadi pedoman bagi pelaku pariwisata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata. Berdasar atas wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyaluran dana masuk dari tiket masuk hingga perahu, 60% diberikan kepada pemilik lahan dan 40% diberikan kepada pengelola pariwisata. Karena pemilik lahan memiliki kekuasaan yang sangat besar.

4. Pembentukan dan Pendanaan Agen

Pembentukan agen sangat diperlukan untuk memantau situasi di lapangan. Dan agen ini juga bertujuan untuk menghasilkan rencana-rencana strategis sebagai pedoman dalam pemasaran dan pembangunan fisik di kawasan destinasi wisata. Agen ini juga mengemban tugas untuk melakukan riset pasar, memasarkan destinasi wisata, dan mendorong pengembangan sarana dan perusahaan pariwisata. Dalam wawancara yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Dersono membentuk kelembagaan desa yang menaungi sektor pariwisata, seperti Badan Usaha Milik Desa Dersono, Kelompok Sadar Wisata Dusun Maron Desa Dersono, dan Kelompok Usaha Bersama Dusun Maron Desa Dersono. Ketiga lembaga ini turut serta dalam melaksanakan pengelolaan pariwisata di Desa Dersono. Semua dana bersumber dari Pemerintah Desa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Pacitan dan juga dari retribusi pariwisata. Lembaga-lembaga ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga tersebut. Fokusnya pun berbeda-beda dengan tujuan yang sama yaitu membangun pariwisata desa yang lebih baik dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan.

5. Penyediaan Fasilitas dan Operasi.

Situasi di mana pemilik usaha tidak mampu menyediakan fasilitas secara mandiri. Pemerintah berperan dalam menyediakan modal usaha, memberikan subsidi untuk fasilitas dan layanan vital. Namun, tidak dapat membiayai sendiri tetapi dalam jangka panjang merupakan penentu keberhasilan pembangunan pariwisata. Penyediaan fasilitas merupakan jembatan utama untuk pemasaran pariwisata dan juga sebagai alat untuk pengembangan objek wisata.

Semakin baik fasilitas maka semakin baik pula tempat wisata tersebut. Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa penyediaan fasilitas pariwisata semuanya bersumber dari pemerintah desa seperti tempat parkir, toilet, mushola, warung, dermaga dan perahu. Tempat parkir, toilet, mushola dan dermaga masih berdiri di lahan pribadi milik warga. Selanjutnya warung yang berada di sekitar objek wisata merupakan milik warga sekitar dan dikelola secara langsung. Perahu yang digunakan wisatawan merupakan milik pemerintah desa dan warga. Total ada 106 perahu yang tersedia untuk disewa.

6. **Kebijakan Fiskal, Regulasi dan Lingkungan Sosial yang Kondusif.**

Dalam menjalankan kegiatan pariwisata, diperlukan peran serta masyarakat untuk mengelola pariwisata desa, seperti membuat pemandu wisata dan juga mengelola perahu. Masyarakat secara otomatis berdaya untuk melayani wisatawan yang datang. Kestabilan ekonomi warga pun merata, tidak hanya satu orang yang terkonsentrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemandu wisata. Setiap Kartu Keluarga dibatasi hanya boleh memiliki satu perahu saja sehingga setara dengan warga lainnya. Mereka dalam pelaksanaannya bergiliran sesuai dengan nomor perahu yang tertulis di loket tiket.

Berdasarkan wawancara diperoleh bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Kepala Desa Dersono sudah cukup ideal sesuai dengan APBDes tahun 2020. Kebutuhan pembangunan harus diutamakan karena akan menyangkut kenyamanan warga Desa Dersono khususnya dan akan berdampak pada wisatawan yang berkunjung ke Sungai Maron. Pariwisata Sungai Maron juga akan memberikan kontribusi bagi desa yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

7. **Penyelesaian Konflik Kepentingan Dalam Masyarakat.**

Dalam menyelesaikan konflik, tugas seorang kepala desa adalah menyelesaikan masalah yang terjadi. Peran tokoh masyarakat juga dibutuhkan di sini karena merekalah yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah Desa Dersono juga melibatkan lembaga lain untuk ikut turun tangan secara langsung. Setelah itu, Pemerintah Desa Dersono mengadakan pertemuan formal dan nonformal untuk membahas masalah secara tuntas.

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa dibutuhkan adanya kesadaran pada kedua belah pihak terkait hal-hal yang remeh. Kejadian tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman wisatawan terhadap peraturan dari kedua belah pihak. Dalam menyelenggarakan pariwisata, diperlukan prinsip - prinsip yang membuat wisatawan merasa puas dan ingin berkunjung kembali.

PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Dersono mempunyai tanggung jawab untuk membina dan mengawasi secara langsung industri pariwisata khususnya Sungai Maron. Sungai Maron merupakan destinasi liburan khas yang menawarkan keindahan alam dan wisata air. Peran pemerintah desa beserta kelompok masyarakat sudah mulai ditingkatkan, misalnya halte bus, jamban, pelambatan jalan, dan akses jalan.

Wisatawan yang berkunjung akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang indah, seperti air berwarna hijau marun, aliran sungai yang bersih, pepohonan kelapa di sepanjang aliran air, spot foto yang teratur dan suasana pedesaan yang tenang. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Dersono berusaha untuk mendorong wisatawan agar berkunjung ke destinasi wisata yang sudah dibuka sejak sekitar Tahun 2014. Ada beberapa sistem yang diterapkan Pemerintah Desa Dersono Pringkuku untuk memantau objek wisata provinsi khususnya Sungai Maron.

1. **Keterlibatan masyarakat dengan Pemangku Kepentingan.**

Stakeholder dalam industri pariwisata dapat disebut juga dengan pemangku kepentingan. *Stakeholder* yang dimaksud adalah individu atau kelompok yang terlibat aktif dalam suatu kegiatan atau yang terpengaruh oleh hasil positif maupun negatif dari suatu kegiatan. Peran *stakeholder* sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan pariwisata. *Stakeholder* yang dapat dilibatkan dalam pembangunan pariwisata adalah masyarakat, pemerintah, dan swasta. Pembangunan pariwisata melibatkan ketiga pelaku dapat terlaksana secara optimal. Setiap *stakeholder* yang terlibat

memiliki pengaruh dan kepentingan yang berbeda - beda sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya, sehingga keterlibatan mereka akan memberikan manfaat yang berbeda pula dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata.

Dalam melakukan pengawasan terhadap industri pariwisata Sungai Maron, Pemerintah Desa Dersono melibatkan berbagai pihak. Kondisi ini wajar dikarenakan objek wisata Selat Maron bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, melainkan berada di wilayah pedesaan, maka dari itu pemerintah desa melakukan langkah positif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Pacitan, seperti: Ikatan Pelaku dan Pegiat Pariwisata Kabupaten Pacitan (AP3), Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Kelompok Damkar Pemerintah Kabupaten Pacitan. Pertemuan semacam ini diselenggarakan oleh berbagai pihak melalui perencanaan yang telah dibuat agar pengelola wisata di Desa Dersono Kabupaten Pringkuku berjalan dengan baik dan senantiasa memberikan dukungan yang baik bagi wisatawan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dersono berjalan dengan baik, dengan adanya kerjasama dengan instansi pemerintah setempat diyakini mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata Sungai Maron. Tugas organisasi pemerintah dilihat dari dampak persepsi dan rapat yang dilakukan setempat dinilai kurang dinamis, sehingga warga sekitar agak terhambat dalam menyelesaikan kegiatan industri pariwisata. Kurangnya arahan dan kemajuan berdampak buruk bagi warga sekitar.

2. Identifikasi masalah.

Identifikasi permasalahan merupakan bagian penting dan mendesak dari proses penyusunan rencana pembangunan provinsi untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan. Bukti nyata permasalahan yang sesuai dan penting memperluas kecukupan kebutuhan kemajuan sehingga dapat direpresentasikan secara etis dan administratif. Fakta permasalahan yang dipecahkan oleh pemerintah kota dalam hal pengawasan industri pariwisata adalah dari atas ke bawah. Perbedaan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan industri pariwisata Sungai Maron telah dilakukan pemulihan seperti persiapan oleh pegiat industri pariwisata Sungai Maron dan media untuk mempromosikan industri pariwisata.

Dalam pengawasan destinasi liburan, persiapan dilakukan sebagai tahap yang mendasari untuk memberikan data kepada daerah setempat dalam mengundang kehadiran wisatawan. Persiapan selanjutnya adalah untuk episode penyelamatan di kapal yang diselesaikan oleh kelompok pemadam kebakaran Kabupaten Pacitan setempat. Persiapan lebih lanjut akan dilakukan dengan Dinas Pariwisata dan Pariwisata Kabupaten Kabupaten Pacitan. Gerakan diharapkan ini dapat memberikan pasokan kepada daerah setempat untuk melayani para pelancong.

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Kabupaten Pacitan yaitu membuat poster, akun media sosial Instagram dan Facebook yang bertujuan untuk memperkenalkan wisata Sungai Maron. Promosi yang dilakukan pemerintah desa antara lain dengan menyebarkan brosur di lokasi Sungai Maron, bandara dan biro perjalanan wisata dan terdapat beberapa akun media sosial seperti Kabupaten PacitanKu.com, DiscoverKabupaten Pacitan, dan Kabupaten Pacitan.story yang dikelola langsung oleh pemuda Kabupaten Pacitan. Beberapa artis juga turut berkunjung untuk melakukan pemotretan di Sungai Maron seperti Trans TV. Sungai Maron dalam tata cara pengelolaan wisata, Pemerintah Desa Dersono tengah membenahi berbagai hal agar wisatawan semakin banyak yang berkunjung ke Sungai Maron. Kemajuan yang dilakukan oleh media cetak maupun media online ini diyakini sangat ingin memberikan data dan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Jalur Perairan

Maron, industri pariwisata di Kabupaten Kabupaten Pacitan. Diharapkan pula dengan adanya inovasi yang mutakhir dapat membantu mengoptimalkan kemajuan.

Strategi yang diterapkan Pemerintah Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Kabupaten Pacitan sudah optimal dalam hal pelatihan dan media promosi wisata. Peta pariwisata Kabupaten Kabupaten Pacitan dan brosur pariwisata Kabupaten Kabupaten Pacitan sudah disebarakan melalui hotel dan biro perjalanan wisata. Pemerintah desa selalu berupaya berkoordinasi dengan pihak swasta untuk media promosi. Masyarakat juga turut membantu mempromosikan dengan mengajak teman-teman dari luar daerah untuk berkunjung dan mengunggah foto Sungai Maron ke akun media sosial. Dan pelatihan-pelatihan tersebut juga diharapkan dapat memperoleh antusiasme dari masyarakat setempat. Pelatihan juga bermanfaat untuk memberikan bekal soft skill dari masyarakat setempat.

3. Penyusunan kebijakan manajemen.

Kebijakan pengelolaan merupakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh suatu instansi atau lembaga yang berarti mengelola kegiatan tertentu di suatu wilayah tertentu, termasuk wilayah industri pariwisata. Provinsi sesuai dengan aturan kemandirian daerah diberi kedudukan untuk mengatur dan mengurus sendiri keluarganya, termasuk wilayah industri pariwisata. Pengelolaan Sungai Maron diatur dalam Peraturan Desa Dersono Nomor 04 Tahun 2020 tentang Retribusi Desa. Pedoman mengenai tuntutan bagi pelaku usaha telah disahkan sehingga di bawah pengawasannya pemerintah kota dapat mengendalikan biaya-biaya di lapangan, misalnya biaya pemberhentian, biaya tiket masuk, biaya karcis perahu dan biaya perahu.

Semua keruwetan tersebut telah diselesaikan oleh masyarakat Dusun Maron, Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Kabupaten Pacitan karena sebagian besar mereka yang mengelola secara langsung. Dukungan strategis menjadi hal yang mendasar dan signifikan dalam mengawasi industri pariwisata Sungai Maron. Strategi ini dijadikan sebagai sumber perspektif dalam pengorganisasian pengelola industri pariwisata dengan adanya pedoman yang menjadi semacam perspektif bagi pelaku industri pariwisata di Sungai Maron untuk memudahkan Pemerintah Desa Dersono, Kecamatan Pringukuku, Kabupaten Kabupaten Pacitan dalam menyelesaikan administrasi dan meningkatkan industri pariwisata Sungai Maron.

4. Pembentukan dan Pendanaan Agen dengan Tugas Khusus.

Pembentukan agen berperan dalam pengelolaan sumber daya dan penyaluran manfaat dalam upaya peningkatan potensi pariwisata dan pengelolaan pariwisata Sungai Maron secara optimal. Agen pariwisata yang didirikan oleh warga desa yang anggotanya terdiri atas para pelaku pariwisata yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai motor penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan pariwisata di wilayah desanya dan mewujudkan Sapta Pesona. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa berperan dalam mengelola sumber daya sebagai pengelola pariwisata, yakni dengan membentuk lembaga pariwisata desa.

Para pelaku usaha dapat berperan sebagai wadah sekaligus penggerak dalam memfasilitasi pariwisata. Sejalan dengan pendapat tersebut, Pemerintah Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Kabupaten Pacitan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB), BUMDes, dan Pokdarwis dengan harapan dapat mengembangkan dan mengelola pariwisata Sungai Maron secara optimal. Ketiga pelaku atau lembaga ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam pariwisata Sungai Maron.

Ketiga agen tersebut berperan dalam memperlancar pengelolaan wisata Sungai Maron, selain memperlancar berbagai kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak swasta yang ingin berinvestasi, juga memperlancar berbagai kegiatan pelatihan dari pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak lainnya dengan menyediakan sarana dan prasarana pelatihan

yang mendukung. Pendanaan berasal dari biaya tiket masuk dan tiket perahu. Dari total pendapatan diambil 5% yang akan digunakan untuk pengelolaan agen dan pengelolaan wisata Sungai Maron.

5. **Penyediaan Fasilitas dan Operasi**

Sarana wisata adalah semua sarana dan prasarana yang memudahkan penyelenggaraan kegiatan rekreasi dan pengelolannya oleh wisatawan, pengelola, dan masyarakat. Kebutuhan wisatawan tidak hanya untuk menikmati keindahan alam atau keunikan objek wisata, tetapi juga memerlukan sarana dan prasarana wisata seperti akomodasi (sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, komunikasi, tempat hiburan, hotel/penginapan, rumah makan, dan toko cinderamata), transportasi (jalan alternatif, aspal, rumah kaca, dan jalan setapak), kendaraan (angkutan umum, becak, ojek, dan sepeda) dan lain-lain (masjid, tempat parkir, toilet, dan shelter).

Pengelolaan sarana dan prasarana di Sungai Maron dilakukan secara swadaya. Pemerintah desa memberdayakan masyarakat Dusun Maron, Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Kabupaten Pacitan. Dalam pembangunan sarana dan prasarana tersebut, berbagai pihak turut membantu. Tujuan dibangunnya sarana dan prasarana di Sungai Maron adalah untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Sungai Maron. Sarana dan prasarana di Sungai Maron antara lain tempat parkir mobil dan motor, toilet, mushola, warung dan akses masuk.

Dalam mengelola wisata Sungai Maron, pengelolannya melibatkan warga sekitar Dusun Maron, Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Kabupaten Pacitan. Dampaknya, warga sekitar bisa mendapatkan tambahan lapangan pekerjaan, khususnya ibu-ibu. Warga sekitar selalu melakukan pembenahan fasilitas untuk memberikan kepuasan bagi wisatawan dan merasakan kesenangan saat berkunjung ke Sungai Maron.

6. **Menyediakan kebijakan fiskal, regulasi dan lingkungan sosial yang kondusif.**

Kebijakan fiskal yang berkaitan dengan sektor perekonomian harus ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh instansi atau lembaga agar tercapai lingkungan masyarakat yang harmonis dan tenteram. Kebijakan fiskal juga berguna untuk mengelola keuangan dari pendapatan yang diperoleh dari Sungai Maron yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan wilayah Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Kabupaten Pacitan. Kebijakan fiskal juga digunakan untuk memperluas kesempatan kerja bagi penduduk setempat, yang akan meningkatkan taraf ekonomi penduduk setempat.

Dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjelasan APPDes, pemerintah Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Kabupaten Pacitan menambahkan keuntungan untuk melaksanakan pembangunan desa yang juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Retribusi Desa juga terkait dengan besaran retribusi yang dihimpun dari pendapatan wisata Sungai Maron. Besaran retribusi tersebut juga akan disalurkan kepada masyarakat sekitar dalam bentuk pembangunan akses jalan dan lain sebagainya. Kebijakan fiskal yang tertuang dalam peraturan desa tersebut sangat tepat mengingat latar belakang kondisi wilayah tersebut.

7. **Penyelesaian konflik kepentingan dalam masyarakat.**

Benturan kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi berbenturan atau bahkan tampak berbenturan dengan kepentingan lain. Adanya benturan kepentingan yang nyata atau potensial belum tentu merupakan pelanggaran kode etik. Benturan kepentingan yang terjadi menyebabkan proses pengelolaan pariwisata mengalami stagnasi. Yang berujung pada penghentian sementara kegiatan di suatu objek wisata.

Peran instansi dan lembaga yang menjadi bagiannya sangat diperlukan untuk menyelesaikan secara langsung konflik yang terjadi antar kepentingan. Dalam pengelolaan

pariwisata, konflik kepentingan harus dihindari agar dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Perlu kesadaran dari masing-masing pihak untuk meredakan ego masing-masing agar konflik tidak membesar dan menjamur bertahun-tahun. Di objek wisata Sungai Maron, terjadi konflik kesalahpahaman antara pengelola Sungai Maron dengan Pantai Ngiroboyo.

Pertemuan yang dilakukan untuk menyelaraskan ide perlu dilakukan agar dalam mengelola masing-masing objek wisata dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik. Langkah yang diambil oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan sudah sangat tepat dan optimal. Wadah kehadiran bagi kedua belah pihak dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik ini. Konflik kepentingan di masyarakat terkait pariwisata muncul dengan perlunya manajemen krisis agar hal tersebut tidak terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengelolaan Sungai Maron yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan dan sudah cukup optimal dalam memberikan Peraturan Desa dan kebijakan terkait dengan pengelolaan Sungai Maron. Proyek atau kegiatan sesuai dengan aksesibilitas rencana belanja kota dan kemajuan Sungai Maron dalam industri perjalanan wisata. Dalam pelaksanaan sistem pelaksana industri perjalanan, Sungai Maron belum ada persiapan yang serius karena persiapan tersebut sangat berharga untuk menyelesaikan tugas dewan industri perjalanan.

Pemerintah desa bekerja sama dengan warga Dusun Maron, Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan untuk terjun langsung dalam melakukan pengawasan terhadap industri perjalanan Sungai Maron. Pemberdayaan ini juga memberikan dampak yang sangat signifikan terutama dari segi perekonomian masyarakat dan juga penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan berperan penting dalam pengembangan pariwisata di Sungai Maron Kabupaten Pacitan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola pariwisata yang ingin menerapkan hal serupa di daerah lain. Pemberdayaan warga desa juga memberikan dampak yang sangat signifikan terutama dari segi perekonomian masyarakat dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan berperan penting dalam pengembangan pariwisata di Sungai Maron Kabupaten Pacitan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola pariwisata yang ingin menerapkan hal serupa di daerah lain.

Nilai kebaharuan penelitian ini terkait topik yang dijelaskan dan dibahas. Mengingat bahwa masih sangat sedikit penelitian yang mengangkat tema pengelolaan pariwisata dari segi aktor atau kelembagaan yang terlibat. Sebuah strategi pengelolaan pariwisata di Kawasan pedesaan yang terjadi setelah pandemi Covid-19. Bagi penelitian selanjutnya dapat melihat pengelolaan pariwisata dari segi aktor atau kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, I. ., Mahmud, A., Susilowati, N., & Prawitasari, A. . (2021). Sinergitas Bumdes dalam pengelolaan pengelolaan desa wisata menuju pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Abdimas*, 25(2), 169–174.
- Buditiawan, K. (2020). Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Jember. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 37–50.
- Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. *Tourism Management*,

21(1), 97-116.

- Dewi, N. (2021). Dampak Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap Pengaturan Hukum Bisnis Kepariwisata Indonesia. *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 1(2), 57-67.
- Fernanda, S. D., & Sukmana, H. (2024). Manajemen Pengelolaan Bumdes Mutiara Welirang Dalam Pengembangan Wisata Taman Ganjaran. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 10252-10268.
- Handisa, R. (2022). Standardisasi Manajemen Pariwisata Alam. *STANDARD: Better Standard Better Living*, 1(4), 22-24.
- Hariani, Y. S., Suryawardani, I. G. A. O., & Diarta, I. S. (2020). Kepuasan Wisatawan Terhadap Elemen Daya Tarik Wisata Pantai Kuta Lombok. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 6, 557.
- Isabella, A. (2024). Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen Pariwisata Desa Way Tebing Cepa Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 4(4), 1-10.
- Nofiasari, W., Paramitha, S. ., & Saputra, I. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial dalam Membranding Pariwisata Sungai Maron di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 24(2), 265-277.
- Sulistyo, A., Noviati, F., Yudiandri, T. ., Rahmawati, A., Suharyono, E., & Kristianto, D. . (2023). Penerapan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Berbasis Masyarakat: Studi di Desa Wisata Poncokusumo. *Jurnal Penelitian Bisnis Dan Pariwisata*, 3(2), 95-107.

